

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Implementasi pendirian Perseroan melalui Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 di Kantor Notaris Firdaus, S.H. M.Kn., Kantor Notaris Sunarto S.H., dan Kantor Notaris Nuning Fauziah Affiani S.H., yaitu :
 - a. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris telah melaksanakan peraturan yang ada dengan baik. Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM pengesahan badan hukum Perseroan, mereka mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan cara mengakses situs www.ahu.go.id dan memasukkan *username* dan *password* yang dimiliki oleh ketiga Notaris itu masing-masing. Selanjutnya ketiga Notaris mengisi format pendirian Perseroan. Pengisian format pendirian Perseroan ada pada gambar 9 sampai gambar 30 dan selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris tersebut membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak pengesahan badan hukum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000,00 di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan cara menunjukkan bukti tagihan pemesanan nomor voucher pengesahan badan hukum Perseroan.
 - c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016
Semua Notaris tersebut telah mengisi format pendirian Perseroan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut dijadikan syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas pada masing-masing Notaris. Ketiga Notaris tersebut

melakukan pengunggahan Akta pendirian Perseroan pada sistem AHU online setelah membayar biaya Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebesar Rp. 580.000,00 di Bank Negara Indonesia dengan cara menunjukkan tagihan PNRI. Setelah semua selesai, ketiga Notaris menyimpan dokumen pendukung pendirian Perseroan, termasuk juga minuta Akta pendirian Perseroan.

d. Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Ketiga Notaris telah mengisi pernyataan yang menyatakan format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris harus bertanggung jawab penuh. Hal tersebut ditunjukkan Notaris dengan memberikan tanda *ceklist* pada gambar 23 Tampilan Peringatan Tanggung Jawab.

e. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Ketiga Notaris langsung mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Namun ketiga Notaris tersebut tidak mencetak Surat Keputusan menggunakan kertas F4/folio dengan berat 80 gram, melainkan memakai kertas dengan berat 100 gram.

Notaris Sunarto telah melakukan proses pendirian Perseroan melalui sistem AHU online sebanyak 49 kali, lebih banyak dengan kedua Notaris yang lainnya. Proses pendirian Perseroan paling cepat dilakukan di Kantor Notaris Nuning Fauziah Affiani S.H yaitu dengan waktu 2-5 jam saja.

Pada Kantor Notaris Sunarto S.H dan Nuning Fauziah Affiani S.H tidak memerlukan syarat bukti setor modal melalui bank, sedangkan di Kantor Notaris Firdaus S.H., M.Kn harus memakai dokumen tersebut.

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Kantor Notaris Firdaus, S.H. M.Kn., Kantor Notaris Sunarto S.H., dan Kantor Notaris Nuning Fauziah Affiani S.H., yaitu mengenai jaringan internet yang lambat, sering terjadi gangguan pada sisem AHU yang menyebabkan sistem menjadi

error, sulitnya berkomunikasi dengan pelayanan sistem AHU online, kurangnya syarat pendirian Perseroan Terbatas dari pendiri dan solusi yang dilakukan adalah mengganti atau melakukan pengecekan jaringan internet sebelum melakukan proses pendirian Perseroan, menunggu sistem AHU menjadi normal kembali, datang langsung ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum untuk melakukan konsultasi, melakukan proses pendirian Perseroan Terbatas jika semua syarat telah terpenuhi.

B. SARAN

1. Hendaknya pencetakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebaiknya dilakukan Notaris sesuai dengan peraturan yang ada. Notaris harus lebih berhati-hati dengan *username* dan *password* yang mereka punya agar tidak dipersalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Notaris sebagai pelaksana atau pemohon pendirian Perseroan harus selaras dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembuat aturan dan sitem AHU online tersebut. Kantor Notaris sebaiknya menggunakan jaringan internet dan perangkat komputer dengan kualitas yang baik agar jaringan internet tidak lambat.
2. Hendaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya layanan badan hukum melakukan perbaikan-perbaikan server pada layanan AHU online, seperti memperbesar kapasitas server. Hal tersebut berguna agar koneksi menjadi cepat dan proses pendirian Perseroan berjalan lancar. Layanan sistem AHU online harus memperbaiki pelayanan *call center* agar dapat dengan mudah dihubungi oleh Notaris apabila ada yang ingin ditanyakan. Pemerintah diharapkan juga harus memperhatikan wialyah-wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas jaringan inernet yang baik dan memberi solusi terhadap pendirian Perseroan Terbatas di wilayah tersebut.
3. Hendaknya masyarakat diharapkan lebih mengetahui syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas sebelum melakukan pendirian. Hal ini dilakukan untuk lebih menghemat waktu dalam pendirian Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Ahmad Fauzi. 2015. *Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

DR. Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Aksara.

GHS. Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Erlangga.

Gunawan Widjaja. 2008. *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.

Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2011. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*. Bandung: Refika Aditama.

HB. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

I.G Rai Widjaja. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin.

_____. 2002. *Hukum Perusahaan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang No. Itahun 1995*. Jakarta : Kesaint Blanc.

- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan NKRI
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Moderen Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation Studies of Business Law.
- Putri A.R.. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jakarta: Sofmedia.
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak, Teori, dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- _____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Tri budiono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media.
- Try Widiyono. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas*. Bogor : Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

JURNAL

Amiram Gill. 2008. *“Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda”*. *Berkeley Journal of International Law*. Volume 26 Issue 2

Dedy Ahmad Wiryadi. 2016. “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum”. *Jurnal Universitas Sumatra Utara*. Vol 1. Medan : Universitas Sumatra Utara

Herlien Budiono. 2012. “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol 1, No 2,. Bandung : Universitas Parahyangan Bandung

Purbandari. 2014. “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit”. *E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1, No 1,

Steven Munch. 2012. *“Improving the Benefit Corporation: How Traditional Governance Mechanisms Can Enhance the Innovative New Business Form”*. *Northwestern Journal of Law & Social Policy* 7 Nw. J. L. & Soc. Pol'y. 170

INTERNET

<http://news.detik.com/berita/2536323/kini-pengesahan-yayasan-dan-perkumpulan-di-kemenkum-ham-cukup-hanya-10-menit> diakses pada tanggal 17 April

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php> diakses pada tanggal 17 April 2016

http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/EDITED_Paparan-Direktur-acara-PPATK-versi-tambahan.pdf diakses pada tanggal 17 Agustus 2016